



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : USMAN A. GANI
2. Jabatan : KETUA JURUSAN TEKNIK KIMIA
3. NHK : 96540

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 3.000.000.000		
2. Tanah Seluas 360 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 1626 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	453.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR VARIO 125 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	108.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.354.731
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	7.661.354.731



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.661.354.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.